

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian dari penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2018 - 2021. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang telah ditetapkan dengan beberapa kriteria.

Tabel 4.1. Pemilihan Sampel

NO	Keterangan	Jumlah
1	Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung	13
2	Kota yang ada di Provinsi Lampung	2
3	Jumlah Kabupaten/Kota yang digunakan	15
4	Jumlah observasi (4tahun x15)	60

Sumber : data sekunder diolah, 2021.

Berdasarkan kriteria sampel dan prosedur penyampelan pada tabel 4.1 diatas dapat diketahui jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 15 Kabupaten/Kota diseluruh Provinsi Lampung dengan periode penelitian 4 tahun, sehingga total sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 sampel.

4.2. Hasil Analisa Data

4.2.1. Statistic Deskriptif

Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari website www.bps.go.id berupa data indeks pembangunan manusia, statistik keuangan kabupaten/kota di Provinsi Lampung dari tahun 2018 - 2021. Variabel dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, DAK, DBH, dan Derajat Desentralisasi. Statistik deskriptif dari variabel sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung selama periode 2018 sampai dengan tahun 2021 disajikan dalam table 4.2 berikut.

Tabel 4.2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
P.Ekonomi	60	,00	,09	,0445	,02880
PAD	60	23481042,00	991584810,00	146261011,6500	166976288,52286
DAU	60	44173749,00	1378175214,00	724025116,0000	286523162,84337
DAK	60	16861552,00	466131375,00	233685559,9167	89989607,23703
DBH	60	4007079,00	65728526,00	11549037,8667	11696716,32816
D.DESENTRAL	60	,03	,37	,0915	,07090
B.MODAL	60	86891168,00	465984738,00	233535782,4500	85896720,89178
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Output SPSS 21

Berdasarkan Tabel 4.2 nilai N menunjukkan jumlah sampel observasi yang digunakan didalam penelitian ini sebanyak 60 observasi yang diambil dari data laporan publikasi tahunan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yang diterbitkan di Bursa Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Dilihat dari tabel diatas semua nilai memiliki nilai positif. Berikut perincian data deskriptif yang telah diolah.

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar 0,09 yang terletak pada Kabupaten Lampung Timur tahun 2018 dan 0,00 yang terletak pada Kabupaten Lampung Barat tahun 2020. Mean atau rata – rata Variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,0445 dan Standar Deviasi sebesar 0,02880.
2. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar 991584810,0 yang terletak pada Kota Bandar Lampung tahun 2021 dan 23481042,0 yang terletak pada Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018. Mean atau rata – rata Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 146261011,6 dan Standar Deviasi sebesar 166976288,5.
3. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar 1378175214 yang terletak pada Kabupaten Lampung

Tengah tahun 2019 dan 44173749,00 yang terletak pada Kota Metro tahun 2021. Mean atau rata – rata Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 724025116,00 dan Standar Deviasi sebesar 286523162,8.

4. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar 466131375,00 yang terletak pada Kabupaten Lampung Tengah tahun 2018 dan 16861552,00 yang terletak pada Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2021. Mean atau rata – rata Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 233685559,9 dan Standar Deviasi sebesar 89989607,2.
5. Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar 65728526,00 yang terletak pada Kabupaten Lampung Timur tahun 2021 dan 4007079,00 yang terletak pada Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2021. Mean atau rata – rata Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 11549037,87 dan Standar Deviasi sebesar 11696716,3.
6. Variabel Derajat Desentralisasi memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar 0,37 yang terletak pada Kota Bandar Lampung tahun 2021 dan 0,03 yang terletak pada Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2019. Mean atau rata – rata Variabel Derajat Desentralisasi sebesar 0,0915 dan Standar Deviasi sebesar 0,0709.

4.3.Uji Asumsi Klasik

Penelitian dengan menggunakan model regresi membutuhkan beberapa pengujian asumsi klasik untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala multikolinearitas, gejala heteroskedastisitas dan gejala autokorelasi. Pengujian-pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

4.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data statistik dan analisis grafik dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)*. Dasar pengambilan keputusan untuk uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* adalah (Ghozali, 2016):

- 1) Jika nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05 atau 5% berarti data residual terdistribusi tidak normal.
- 2) Jika nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05 atau 5% berarti data residual terdistribusi normal.

Tabel 4.3. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	62133222,44937915
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,080
	Negative	-,052
Kolmogorov-Smirnov Z		,623
Asymp. Sig. (2-tailed)		,832

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS 21

Berdasarkan hasil uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* pada tabel 4.3 menunjukkan nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* yaitu 0,832. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal.

4.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi yang bebas multikolinearitas adalah yang mempunyai nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau *VIF* ≤ 10 . Apabila atau nilai VIF \geq maka terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2016).

Tabel 4.4. Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	84101681,771	38450014,486			
P.Ekonomi	1009985744,272	304808291,836	,339	,945	1,058
1 PAD	,209	,158	,407	,104	9,582
DAU	-,044	,058	-,148	,264	3,793
DAK	,477	,162	,500	,344	2,910
DBH	,447	,821	,061	,789	1,267
D.DESENTRAL	-118071205,583	330278257,508	-,097	,133	7,529

a. Dependent Variable: B.MODAL

Sumber : Output SPSS 21

Pada Tabel 4.4 dapat kita lihat bahwa variabel independen secara keseluruhan memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terdapat multikolinearitas.

4.3.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t -1 (Ghozali, 2013). Pengujian gejala autokorelasi dilakukan dengan

menggunakan uji *Durbin-Watson*, apabila $DU < DW < (4 - DU)$ maka tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4.5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,690 ^a	,477	,418	6555924,93475	2,046

a. Predictors: (Constant), D.DESENTRAL, DAK, P.Ekonomi, DBH, DAU, PAD

b. Dependent Variable: B.MODAL

Sumber : Output SPSS 21

Dari hasil uji *Durbin Watson* pada tabel 4.5, diketahuinilai *Durbin Watson* (DW) adalah sebesar 2,046 dengan batas atas (DU) 1,8082. Nilai DW lebih besar dari batas atas (DU) 1,8082 dan kurang dari $4 - 1,8082 = 2,1918$ ($4 - DU$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

4.3.4. Uji Heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas diperlukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jika variabel independen secara statistik menunjukkan nilai probabilitas signifikansinya > 0.05 , maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 2013).

Tabel 4.6. Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	66025053,984	21793223,490		3,030	,004
P.Ekonomi	171281157,190	172763399,817	,134	,991	,326
PAD	,098	,090	,443	1,088	,282
DAU	,020	,033	,155	,607	,546
DAK	-,116	,092	-,283	-1,261	,213
DBH	-,072	,466	-,023	-,154	,878
D.DESENTRAL	-272064250,002	187199614,253	-,524	-1,453	,152

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Output SPSS 21

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, pad, dau, dak, dbh dan derajat desentralisasi memiliki nilai signifikan $> 0,05$ (0,326; 0,282; 0,546; 0,213; 0,878; 0,152 $> 0,05$). Artinya 6 variabel memenuhi syarat terhindar dari heteroskedastisitas.

4.3.5. Uji Regresi Linier Berganda.

Tabel 4.7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	84101681,771	38450014,486		2,187	,033
P.Ekonomi	1009985744,272	304808291,836	,339	3,314	,002
PAD	,209	,158	,407	1,322	,192
DAU	-,044	,058	-,148	-,763	,449
DAK	,477	,162	,500	2,951	,005
DBH	,447	,821	,061	,545	,588
D.DESENTRAL	-118071205,583	330278257,508	-,097	-,357	,722

a. Dependent Variable: B.MODAL

Berdasarkan tabel diatas maka interpretasinya adalah Hasil konstanta sebesar 84101681,771 berarti apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, DBH dan Derajat Desentralisasi tidak ada atau sama dengan 0 maka Belanja Modal sebesar 84101681,771. Koefisien variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1009985744,272. Hal ini berarti apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi menambah 1% maka variabel Belanja Modal akan meningkat sebesar 1009985744,272. Koefisien PAD sebesar 0,209. Hal ini berarti apabila PAD menambah 1% maka variabel Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,209. Koefisien DAU sebesar -0,044. Hal ini berarti apabila DAU menambah 1% maka variabel Belanja Modal akan menurun sebesar -0,044. Koefisien DAK sebesar 0,477. Hal ini berarti apabila DAK menambah 1% maka variabel Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,447. Koefisien DBH sebesar 0,447. Hal ini berarti apabila DBH menambah 1% maka variabel Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,447. Koefisien Derajat Desentralisasi sebesar -118071205,583. Hal ini berarti apabila Derajat Desentralisasi menambah 1% maka variabel Belanja Modal akan menurun sebesar -118071205,583.

4.4. Uji Hipotesis

4.4.1. Uji KoefisienDeterminasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) menggambarkan seberapa sejauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apabila nilai *adjusted* R² mendekati nilai satu maka variabel independen hampir memberikan semua informasi untuk memprediksi variabel dependen. Jika *adjusted* R² mendekati nol maka semakin lemah variabel independen menerangkan variabel dependen terbatas (Ghozali, 2016).

Tabel 4 8. Hasil Uji KoefisienDeterminasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,690 ^a	,477	,418	65555924,93475

a. Predictors: (Constant), D.DESENTRAL, DAK, P.Ekonomi, DBH, DAU, PAD

Sumber : Output SPSS 21

Dari tabel diatas diketahui hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,477 artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan varians variabel dependen yaitu sebesar 47,7% dan sisanya sebesar 52,3% dijelaskan oleh variabel lain.

4.4.2. Uji F-test

Menurut Ghozali (2016) Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikan (α) yang digunakan adalah 5%, distribusi F dengan derajat kebebasan ($\alpha; K-1, n-K-1$).

Kriteria pengujian :

a. $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau signifikansi > 0.05 . H_0 diterima, artinya variabel independen secara serentak atau bersamaan tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

b. $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau signifikansi < 0.05 . H_0 ditolak, artinya variabel independen secara serentak atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Tabel 4 9. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	207544850353003808,000	6	34590808392167300,000	8,049	,000 ^b
1 Residual	227771702584697952,000	53	4297579294050905,000		
Total	435316552937701760,000	59			

a. Dependent Variable: B.MODAL

b. Predictors: (Constant), D.DESENTRAL, DAK, P.Ekonomi, DBH, DAU, PAD

Sumber : Output SPSS 21

Dari hasil uji ANOVA atau *F test*, di dapatkan hasil signifikansi sebesar 0,000 atau $< 0,05$ sehingga model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena semua variabel independen (Pertumbuh Ekonomi, PAD, DAU, DAK, DBH dan

Derajat Desentralisasi) berpengaruh terhadap variabel dependen Belanja Modal.

4.4.3. Uji t-test

Uji Statistik t dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh antar masing-masing (*parsial*) variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan pada tingkat Apabila nilai keyakinan significant < 95% a tingkat signifikan (0,05) maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependennya, sebaliknya jika nilai signifikan $t >$ tingkat signifikan (0,05) maka variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya. (Ghozali, 2016)

Tabel 4 10. Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	84101681,771	38450014,486		2,187	,033
P.Ekonomi	1009985744,272	304808291,836	,339	3,314	,002
1 PAD	,209	,158	,407	1,322	,192
DAU	-,044	,058	-,148	-,763	,449
DAK	,477	,162	,500	2,951	,005
DBH	,447	,821	,061	,545	,588
D.DESENTRAL	-118071205,583	330278257,508	-,097	-,357	,722

a. Dependent Variable: B.MODAL

Sumber : Output SPSS 21

Dari hasil perhitungan diatas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan table 4.10 hasil pengujian menunjukkan variable Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variable Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan kata lain H1 diterima.
2. Berdasarkan table 4.10 hasil pengujian menunjukkan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,192 yang lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variable

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal dengan kata lain H2 ditolak.

3. Berdasarkan table 4.10 hasil pengujian menunjukkan variable Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,449 yang lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan kata lain H3 ditolak.
4. Berdasarkan table 4.10 hasil pengujian menunjukkan variable Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,005 yang lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan kata lain H4 diterima.
5. Berdasarkan table 4.10 hasil pengujian menunjukkan variable Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,588 yang lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan kata lain H5 ditolak.
6. Berdasarkan table 4.10 hasil pengujian menunjukkan variable Derajat Desentralisasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,722 yang lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variable Derajat Desentralisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan kata lain H6 ditolak.

4.5. Pembahasan Penelitian.

4.5.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal.

Pada hasil analisis data yang dilakukan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi selalu menjadi faktor penentu dalam belanja modal. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan ekonomi pada tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai pertumbuhan produk

domestik bruto (PDB), terlepas dari apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah struktur ekonomi telah berubah atau apakah sistem kelembagaan telah membaik. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan pendapatan nasional yang signifikan dalam kurun waktu tertentu (peningkatan pendapatan per kapita).

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syukri & Hinaya, 2019) memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap variabel belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Ayem dan Pratama (2018), memperoleh hasil berupa terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat dan Purniawati (2017), memperoleh hasil berupa terdapat pengaruh negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal. Hasil ini sama dengan penelitian (Sepriadi & Mulyani, 2021) yang memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal.

4.5.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dari Daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sementara itu, menurut (Hairiyah, 2017) Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tulang punggung dalam pembiayaan daerah. Kemampuan suatu daerah menggali pendapatan asli daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diatas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh maka akan semakin besar pula dana yang harus di salurkan lewat belanja langsung untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program program pembangunan daerah. Namun hal itu belum tentu sepenuhnya terjadi kenaikan pada belanja modal karena belanja modal hanya bagian dari kelompok belanja langsung dari belanja daerah (Suryani dan Pariani, 2018).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hairiyah, 2017), hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif antara pendapatan asli daerah dengan variabel belanja modal. Penelitian serupa yang dilakukan oleh (Khasanah, 2016), memperoleh hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap variabel belanja modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Vanesha & Parmadi, 2019) yang memperoleh hasil pendapatan asli daerah tidak berpengaruh pada belanja modal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Suryani & Pariani, 2018) yang memperoleh hasil bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal.

4.5.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.

Dalam rangka pemberian dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah guna mengatasi ketimpangan yang terjadi dikarenakan setiap daerah memiliki sumber daya yang berbeda-beda atas dasar keadilan pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi. Menurut Kementerian Keuangan Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar - Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Djpk.kemenkeu.go.id). Hasil penelitian di atas Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil ini menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota yang mendapatkan DAU yang besar tidak memiliki belanja modal yang besar (Sepriadi dan Mulyani, 2021) atau DAU yang diterima dalam prakteknya dimanfaatkan untuk belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja operasi, belanja barang dan subsidi (Aditya, 2017).

Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suryani & Pariani, 2018), menunjukkan adanya pengaruh positif antara dana alokasi umum dengan variabel belanja modal. Penelitian serupa yang dilakukan oleh (Sudrajat & Purniawati, 2017) memperoleh hasil bahwa dana alokasi umum berpengaruh

positif terhadap variabel belanja modal. Sedangkan pada penelitian (Ayem & Pratama, 2018) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara dana alokasi umum dengan belanja modal. Sama seperti penelitian (Sepriadi & Mulyani, 2021) yang memperoleh hasil dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal.

4.5.4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal.

Menurut Kementerian Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Djpk.kemenkeu.go.id). Hasil dari penelitian diatas Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. Pendapatan daerah yang berupa dana transfer dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan professional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan DAK untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Hairiyah & Malisan, 2017).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hairiyah & Malisan, 2017) menunjukkan adanya hubungan positif antara dana alokasi khusus dengan variabel belanja modal. Penelitian serupa yang dilakukan oleh (Vanesha & Parmadi, 2019), memperoleh hasil bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap variabel belanja modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gerungan (Ayem & Pratama, 2018) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh positif antara dana alokasi khusus dengan belanja modal. Hasil ini sama dengan

penelitian (Sudrajat & Purniawati, 2017) yang memperoleh hasil bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal.

4.5.5. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal.

Menurut Kementerian Keuangan Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Djpk.kemenkeu.go.id). Tujuan Dana Bagi Hasil adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Hasil penelitian diatas bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan melalui alokasi anggaran ke sektor Belanja Modal merupakan salah satu yang diharapkan dilakukan oleh Pemda dengan adanya DBH ini, namun demikian jumlah penerimaan DBH yang relatif kecil jika dibandingkan dengan penerimaan lainnya seperti PAD dan juga DAU membuat pengaruh DBH terhadap Belanja Modal menjadi tidak signifikan (Setyarini & Rustiyaningsih, 2021).

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sibuea, 2021) menunjukkan adanya hubungan positif antara dana bagi hasil dengan variabel belanja modal. Penelitian serupa yang dilakukan oleh (Sudrajat & Purniawati, 2017) memperoleh hasil bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap variabel belanja modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Salsabila, 2021) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh positif antara dana bagi hasil dengan belanja modal. Hasil ini serupa dengan penelitian (Setyarini & Rustiyaningsih, 2021) memperoleh hasil dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal.

4.5.6. Pengaruh Derajat Desentralisasi Terhadap Belanja Modal.

Menurut (Mataris & Digidowiseso, 2022) desentralisasi fiskal adalah penugasan ke daerah atau sumber daya pemerintah daerah untuk membiayai fungsi-fungsi yang telah ditugaskan kepada mereka. Ini melibatkan penugasan baik sumber pendapatan asli daerah maupun transfer fiskal antar pemerintah. Sumber pendapatan asli daerah tidak hanya mencakup pajak daerah, tetapi juga pendapatan dari retribusi dan iuran, dari badan usaha milik daerah dan sumber pendapatan lain-lain. Pemerintah mempunyai wewenang lebih luas untuk mengelola keuangan daerahnya dengan adanya desentralisasi fiskal, sehingga alokasi belanja modal untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, dapat ditingkatkan. Semakin tinggi rasio derajat desentralisasi fiskal suatu daerah, maka kemampuan daerah tersebut untuk mengalokasikan belanja daerahnya ke belanja modal akan lebih tinggi. Hasil penelitian diatas bahwa derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Rasio derajat desentralisasi dimaksudkan untuk mengukur tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan yang dikelola sendiri oleh daerah terhadap total penerimaan daerah. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Idealnya semua pengeluaran daerah dapat dipenuhi dengan menggunakan PAD sehingga daerah dapat benar-benar otonom, tidak lagi tergantung ke Pemerintah Pusat. Dengan demikian PAD memiliki peran yang sangat sentral dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah (Sartika & Indrawati, 2017).

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian (Sibuea, 2021) memperoleh hasil derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Hasil ini serupa dengan penelitian (Putri & Rahayu, 2019) memperoleh hasil bahwa derajat desentralisasi berpengaruh pada belanja modal. Berbeda dengan penelitian (Marlianita & Soleh, 2020) memperoleh hasil bahwa derajat desentralisasi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal. Hasil ini

serupa dengan penelitian (Sartika & Indrawati, 2017) yang memperoleh hasil bahwa derajat desentralisasi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal.